

Menjinakkan Juggernaut: Analisis Giddensian atas Negosiasi Tradisi di Indonesia

Fadhil Ahsan, Reo Chandrika

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 24 June 2026

Available online 23 June 2026

Keywords

Giddensian Theory; Negotiation;
Tradition; Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

*Modernity is often understood as a hegemonic force that linearly erodes, disrupts, and ultimately eliminates the existence of local traditions. Drawing upon Anthony Giddens' metaphor of the 'juggernaut of modernity', this article challenges such a simplistic thesis by providing an in-depth analysis of how Indonesian society negotiates tradition amid the currents of radical modernity. Employing a library research approach grounded in qualitative-conceptual methods, the article examines the dialectical dynamics between disembedding mechanisms, social reflexivity, and the reconstruction of cultural identity. The analysis reveals that in Indonesia, traditions neither disappear nor merely survive passively in marginal forms. Rather, they undergo processes of re-embedding, active reinterpretation, and revitalization through the very instruments of modernity itself. This phenomenon is critically explored through three loci: the pluralization of religious authority in the digital era, the philosophical reconstruction of the Minangkabau matrilineal tradition within the context of globalization, and the rationalization of Javanese agricultural rituals (*Wiwitan* and *Slametan*) amid agrarian modernization. The article offers a theoretical contribution through the*

concept of "taming the juggernaut," a reflexive socio-cultural strategy whereby Indonesian communities position themselves as active agents capable of directing and domesticating the disruptive forces of modernity in order to preserve the continuity of their spiritual and cultural identities. This form of hybrid coexistence reinforces the thesis of global desecularization while simultaneously proposing an alternative model of modernity that challenges the secular universalism of the West.

ABSTRAK

Modernitas kerap dipahami sebagai kekuatan hegemonik yang secara linear mengikis, mendisrupsi, dan akhirnya memusnahkan eksistensi tradisi lokal. Melalui metafora *juggernaut of modernity* yang dirumuskan oleh Anthony Giddens, artikel ini mendobrak tesis simplistik tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana masyarakat Indonesia menegosiasikan tradisi di tengah arus modernitas radikal. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) berbasis metode kualitatif-konseptual, artikel ini mengkaji dinamika dialektis antara *disembedding mechanisms*, refleksivitas sosial, dan rekonstruksi identitas kultural. Hasil analisis menunjukkan bahwa di Indonesia, tradisi tidak sekadar punah atau bertahan secara pasif dalam bentuk marjinal, melainkan mengalami proses re-embedding, reinterpretasi aktif, dan revitalisasi melalui instrumen modernitas itu sendiri. Fenomena ini dianalisis secara kritis melalui tiga lokus: pluralisasi otoritas keagamaan di era digital, rekonstruksi filosofis adat matrilineal Minangkabau dalam arus globalisasi, serta rasionalisasi ritual pertanian Jawa (*Wiwitan* dan *Slametan*) di tengah modernisasi agraris. Artikel ini menawarkan kontribusi teoretis berupa konsep "menjinakkan juggernaut" (*taming the juggernaut*), yaitu sebuah strategi sosial-budaya reflektif di mana masyarakat Indonesia memosisikan diri sebagai aktor aktif yang mengarahkan dan menjinakkan daya disruptif modernitas demi menjaga kontinuitas identitas spiritual dan kultural mereka. Koeksistensi hibrida ini memperkuat tesis desekularisasi global sekaligus menawarkan model modernitas alternatif yang menantang universalisme sekuler Barat.

PENDAHULUAN

Fase modernitas kontemporer ditandai oleh laju perubahan yang eksponensial, perluasan ruang lingkup institusional yang melintasi batas-batas teritorial, dan kedalaman penetrasi yang mengubah relasi paling intim dalam kehidupan sehari-hari manusia. Karakter radikal dari era ini bukanlah indikasi transisi menuju posmodernitas, melainkan fase modernitas tinggi (*high*

modernity) atau modernitas radikal, di mana konsekuensi-konsekuensi modernitas menjadi semakin universal, intens, dan tak terelakkan (Giddens, 1990). Dinamika transformasi global yang serba cepat ini digambarkan secara dramatis oleh Anthony Giddens melalui metafora *juggernaut of modernity* (Elsy et al., 2024). *Juggernaut* digambarkan sebagai sebuah mesin raksasa dengan kekuatan luar biasa yang melaju kencang di atas ruang dan waktu (Ritzer & Yagatic, 2012). Manusia secara kolektif dapat mengemudikan mesin ini sampai batas tertentu, namun ia juga menyimpan potensi konstan untuk lepas kendali, berjalan melenceng ke arah yang tidak terduga, dan menghancurkan dirinya sendiri (Elsy et al., 2024).

Bagi masyarakat di Global South, khususnya Indonesia, tantangan eksistensial terbesar di era modernitas tinggi ini adalah bagaimana merespons daya gilas *juggernaut* tersebut tanpa harus mengorbankan jangkar identitas kultural dan spiritual mereka. Di bawah tekanan globalisasi ekonomi, ekspansi teknologi informasi digital, dan penetrasi gaya hidup kosmopolitan, banyak institusi sosial tradisional yang dipaksa masuk ke dalam pusaran detradisionalisasi (Giddens, 1990). Tesis sosiologi klasik, yang sangat dipengaruhi oleh rasionalisme Pencerahan Eropa, memprediksi bahwa modernisasi secara niscaya akan menggusur tradisi dan memicu sekularisasi menyeluruh (Reaves, 2012). Dalam pandangan deterministik tersebut, dunia yang sakral secara bertahap dide-mistifikasi oleh rasionalitas instrumental, menyisakan manusia modern yang terasing di dalam "sangkar besi" birokrasi dan individualisme yang dingin.

Namun, realitas sosiologis di Indonesia menampilkan dinamika yang jauh lebih kompleks, hibrida, dan paradoks. Alih-alih tenggelam dalam sekularisme ekstrem atau mengalami disorientasi eksistensial yang melahirkan keterasingan sosial—sebagaimana yang tampak pada fenomena isolasi sosial akut di masyarakat industri maju seperti Jepang (Elsy et al., 2024)—masyarakat Indonesia justru menunjukkan kegigihan yang luar biasa dalam memelihara religiositas dan merevitalisasi adat lokal (Hannan & Mursyidi, 2023). Fenomena ini secara empiris mendukung tesis desekularisasi yang diajukan oleh Peter Berger, yang menegaskan bahwa modernitas tidak secara inheren memicu kemunduran agama, melainkan menciptakan pluralitas struktur kelayakan (*plausibility structures*) baru di mana keyakinan keagamaan justru dikonstruksi ulang secara aktif¹¹. Di Indonesia, globalisasi dan teknologi modern tidak membunuh tradisi; sebaliknya, keduanya bertindak sebagai katalis bagi reproduksi, re-embedding, dan artikulasi ulang nilai-nilai kultural dan keagamaan (Hannan & Mursyidi, 2023).

Relevansi teoretis dari pemikiran Anthony Giddens dalam menjelaskan fenomena ini terletak pada penolakannya terhadap oposisi biner yang kaku antara modernitas dan tradisi. Dalam karya-karyanya seperti *The Consequences of Modernity*, *Modernity and Self-Identity*, dan *Runaway World*, Giddens menegaskan bahwa dinamika modernitas digerakkan oleh reflektivitas institusional, yaitu suatu kondisi di mana praktik-praktik sosial secara kronis diperiksa dan direformasi berdasarkan informasi dan pengetahuan baru tentang praktik itu sendiri (Giddens, 1990). Melalui lensa reflektivitas ini, tradisi tidak dipahami sebagai warisan statis yang ditakdirkan untuk runtuh di hadapan sains, melainkan sebagai subjek negosiasi yang dapat diorganisasi ulang, dipertanyakan, dan diselaraskan secara kreatif dengan sistem abstrak modernitas (Giddens, 1991).

Meskipun teori modernitas Giddens telah banyak diadopsi dalam sosiologi kontemporer, kajian ilmiah yang secara spesifik menerapkan konsep *juggernaut of modernity* dan reflektivitas sosial dalam menganalisis negosiasi tradisi di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai modernisasi di Indonesia cenderung terjebak dalam dua jebakan teoretis: pertama, melihat tradisi secara romantis-statis sebagai entitas murni yang perlahan-lahan tergerus oleh kapitalisme dan teknologi global (Pranajaya et al., 2020); kedua, melihat kebangkitan tradisi dan agama semata-mata sebagai reaksi defensif yang tertutup (*tribalization*) terhadap ancaman eksternal (Turley, 2014). Terdapat *research gap* yang signifikan dalam menjelaskan bagaimana aktor-aktor sosial di Indonesia, baik secara individual maupun komunal, menggunakan instrumen-instrumen modernitas itu sendiri untuk merekonstruksi tradisi dari dalam.

Artikel ini bertujuan untuk mengisi celah teoretis tersebut dengan menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia menegosiasikan tradisi di tengah arus modernitas tinggi

melalui perspektif teori Giddensian. Rumusan masalah yang diajukan adalah: bagaimana mekanisme *juggernaut* modernitas memengaruhi eksistensi tradisi di Indonesia, dan bagaimana strategi refleksif masyarakat Indonesia dalam mengadaptasi, mereinterpretasi, dan merevitalisasi tradisi keagamaan serta adat lokal sebagai bentuk upaya untuk "menjinakkan" kekuatan disruptif tersebut. Melalui analisis kualitatif-konseptual yang kritis, artikel ini berargumen bahwa masyarakat Indonesia bukanlah korban pasif yang terlindas oleh mesin modernitas, melainkan aktor berpengetahuan (*knowledgeable agents*) yang secara aktif mengarahkan dan menjinakkan *juggernaut* melalui strategi adaptasi budaya dan keagamaan yang refleksif.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif-konseptual. Sifat dari penelitian ini adalah eksploratif, argumentatif, dan analitis-kritis, yang bertujuan untuk merumuskan sintesis teoretis baru dari pertemuan antara teori sosiologi Barat kontemporer dan realitas sosial-budaya di Indonesia (Sugiyono, 2013). Penelitian ini tidak bermaksud melakukan generalisasi empiris kuantitatif, melainkan menawarkan dekonstruksi konseptual terhadap asumsi-asumsi linier mengenai modernitas dan tradisi.

Data dalam penelitian ini berupa data literatur sekunder yang dikumpulkan secara selektif dan sistematis. Sumber data teoretis utama bersumber dari trilogi pemikiran modernitas Anthony Giddens, yaitu *The Consequences of Modernity* (1990), *Modernity and Self-Identity* (1991), dan *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (1984). Sebagai bahan pembanding dan penguat analisis kritis, studi ini juga menelaah karya-karya teoretis dari Ulrich Beck mengenai modernisasi refleksif dan *risk society* (Beck et al., 1994), Zygmunt Bauman mengenai *liquid modernity* (Bauman, 2013), serta Peter Berger mengenai *desecularization* (Sociology Institute, 2025).

Sementara itu, data mengenai dinamika sosial-budaya di Indonesia diperoleh dari artikel-artikel ilmiah bereputasi pada jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan penerbit akademik internasional terkemuka yang mengkaji digitalisasi agama, transformasi hukum adat Minangkabau, dan keberlangsungan ritual pertanian di Jawa.

Teknik analisis data dijalankan melalui metode interpretatif berbasis *double hermeneutics* (hermeneutika ganda) yang dirumuskan oleh Giddens (Dayrobi et al., 2024). Dalam sosiologi Giddensian, para aktor sosial di dunia nyata telah melakukan interpretasi tingkat pertama terhadap tindakan mereka sendiri; peneliti sosial kemudian melakukan interpretasi tingkat kedua terhadap konsep-konsep yang telah diinterpretasikan oleh para aktor tersebut (Dayrobi et al., 2024).

Secara operasional, analisis konseptual ini melalui tiga tahapan:

1. *Reduksi dan Pemetaan Konseptual*: Mengidentifikasi dan membedah elemen-elemen struktural dari konsep *juggernaut*, *disembedding mechanisms*, dan *reflexivity* dalam teks-teks primer Giddens¹.
2. *Dialektika Teoretis-Empiris*: Menghubungkan konsep-konsep abstrak tersebut dengan realitas perubahan budaya di Indonesia. Pada tahap ini, contoh-contoh kasus seperti pengajian daring, transformasi hukum waris adat, dan simplifikasi ritual tani dibaca bukan sekadar sebagai deskripsi fenomena, melainkan sebagai materialisasi dari proses negosiasi refleksif agensi terhadap struktur modernitas (Ritzer & Yagatich, 2012).
3. *Sintesis dan Konstruksi Teoretis*: Merumuskan model teoretis "menjinakkan *juggernaut*" sebagai kebaruan ilmiah (*novelty*) untuk menjelaskan corak khas modernitas hibrida di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernitas sebagai *Juggernaut*: Kerangka Teoretis Anthony Giddens

Untuk memahami bagaimana tradisi dinegosiasikan di era kontemporer, terlebih dahulu perlu dibedah struktur konseptual modernitas dalam pemikiran Anthony Giddens. Giddens menolak pandangan para pemikir posmodernis yang menyatakan bahwa masyarakat telah

memasuki era pasca-modernitas yang ditandai oleh fragmentasi total, runtuhnya narasi besar, dan berakhirnya proyek modernitas (Giddens, 1990). Menurutnya, berbagai fenomena sosial kontemporer—mulai dari globalisasi ekonomi, revolusi teknologi informasi, hingga meningkatnya kecemasan eksistensial individu—justru menunjukkan bahwa modernitas tidak berakhir, melainkan mengalami radikalisisasi dan perluasan dalam skala global. Oleh karena itu, modernitas dipahami sebagai sebuah “proyek diskontinu” yang secara kualitatif berbeda dari seluruh tatanan sosial pra-modern yang pernah dikenal dalam sejarah manusia.

Dalam kerangka teoritis Giddens, modernitas tidak bergerak secara acak, melainkan ditopang oleh tiga mekanisme utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Ketiga mekanisme tersebut adalah distansiasi ruang dan waktu (*space-time distancing*), mekanisme pelepasan (*disembedding mechanisms*), dan reflektivitas modernitas (*reflexivity of modernity*). Melalui interaksi ketiga unsur inilah modernitas menghasilkan perubahan sosial yang bersifat global, dinamis, dan sering kali sulit diprediksi.

1. Distansiasi Ruang dan Waktu (*Space-Time Distanciation*)

Dalam masyarakat pra-modern, ruang (*space*) dan tempat (*place*) merupakan dua unsur yang hampir tidak dapat dipisahkan (Giddens, 1991). Interaksi sosial berlangsung dalam konteks lokal yang terbatas, sehingga kehadiran fisik menjadi syarat utama bagi terbentuknya hubungan sosial, ekonomi, maupun politik (Giddens, 1990). Selain itu, pengukuran waktu masih sangat bergantung pada ritme alam dan tradisi lokal, seperti pergantian musim, posisi matahari, atau kalender keagamaan yang berlaku dalam suatu komunitas (Giddens, 1990).

Modernitas secara radikal mengubah kondisi tersebut melalui proses yang oleh Giddens disebut sebagai distansiasi ruang dan waktu. Pengosongan waktu terjadi melalui standarisasi kalender, jam mekanis, dan sistem pengukuran temporal yang berlaku secara universal. Sementara itu, pengosongan ruang berlangsung melalui perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan sistem pemetaan modern yang memungkinkan manusia berinteraksi tanpa harus berbagi lokasi geografis yang sama (Giddens, 1990). Akibatnya, relasi sosial dapat berlangsung melintasi batas-batas geografis yang sangat luas, sehingga kehadiran fisik tidak lagi menjadi syarat mutlak bagi terbentuknya hubungan sosial yang bermakna.

Perkembangan internet, media sosial, dan teknologi komunikasi digital merupakan contoh paling nyata dari proses ini. Seseorang dapat bekerja, belajar, bertransaksi, bahkan membangun relasi emosional dengan individu lain yang berada ribuan kilometer jauhnya. Dengan demikian, modernitas menciptakan bentuk-bentuk interaksi baru yang melepaskan manusia dari keterikatan tradisional terhadap ruang dan waktu lokal.

2. Mekanisme Pelepasan (*Disembedding Mechanisms*)

Proses distansiasi ruang dan waktu kemudian memungkinkan munculnya apa yang disebut Giddens sebagai mekanisme pelepasan atau *disembedding mechanisms* (Giddens, 1990). Mekanisme ini merujuk pada proses pengangkatan relasi sosial dari konteks lokal tempat relasi tersebut semula terbentuk, lalu menyusunnya kembali dalam jaringan hubungan yang melintasi ruang dan waktu yang lebih luas (Giddens, 1990). Dengan kata lain, kehidupan sosial modern semakin bergantung pada sistem-sistem abstrak yang tidak lagi berakar pada interaksi tatap muka.

Giddens mengidentifikasi dua bentuk utama mekanisme pelepasan. Pertama adalah alat tukar simbolis (*symbolic tokens*), yaitu media pertukaran yang memiliki nilai universal dan dapat digunakan tanpa memperhatikan identitas personal para pelakunya (Giddens, 1990). Contoh paling jelas dari *symbolic tokens* adalah uang modern dan berbagai bentuk transaksi finansial digital yang memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung tanpa hubungan personal langsung antara pihak yang terlibat (Giddens, 1991). Kehadiran uang sebagai simbol universal menjadikan pertukaran ekonomi dapat dilakukan secara efisien dalam skala global.

Bentuk kedua adalah sistem ahli (*expert systems*), yaitu sistem pengetahuan teknis dan profesional yang mengorganisasi berbagai aspek kehidupan modern (Gross & Simmons, 2002). Kehidupan sehari-hari manusia modern sangat bergantung pada sistem-sistem keahlian ini, meskipun sebagian besar individu tidak memahami secara langsung mekanisme kerjanya (Giddens, 1991). Ketika seseorang menggunakan internet, menaiki pesawat terbang, mengendarai kendaraan bermotor, atau mengonsumsi obat-obatan, ia sesungguhnya sedang

menaruh kepercayaan pada sistem keahlian yang berada di luar jangkauan pengetahuannya. Oleh karena itu, kepercayaan dalam masyarakat modern bergeser dari *personal trust* menuju *faceless commitments*, yakni kepercayaan terhadap sistem abstrak yang dianggap memiliki legitimasi rasional (Giddens, 1991).

3. Refleksivitas Modernitas (*Reflexivity of Modernity*)

Karakteristik ketiga yang membedakan modernitas dari masyarakat sebelumnya adalah refleksivitas modernitas (*reflexivity of modernity*) (Beck et al., 1994). Dalam perspektif Giddens, refleksivitas tidak sekadar merujuk pada kemampuan individu untuk berpikir tentang dirinya sendiri, melainkan merupakan karakter institusional yang meresap ke seluruh struktur kehidupan sosial. Modernitas menciptakan kondisi di mana seluruh praktik sosial senantiasa diperiksa, dievaluasi, dan direvisi berdasarkan informasi baru yang terus berkembang (Giddens, 1991).

Dalam situasi seperti ini, sains tidak lagi berfungsi sebagai sumber kepastian mutlak. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah modern justru memperluas ruang keraguan karena setiap temuan selalu terbuka terhadap kritik, revisi, dan pembaruan. Apa yang dianggap benar pada suatu masa dapat berubah ketika muncul pengetahuan baru yang lebih memadai. Oleh sebab itu, kehidupan sosial modern dicirikan oleh kondisi ketidakpastian yang terorganisasi, di mana individu dan institusi harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung secara berkelanjutan.

Refleksivitas ini tidak hanya memengaruhi institusi sosial, tetapi juga identitas individu. Dalam masyarakat modern, identitas tidak lagi diwariskan secara otomatis melalui tradisi, melainkan dibangun melalui proses evaluasi dan pilihan yang terus-menerus. Individu dipaksa untuk secara aktif menentukan gaya hidup, keyakinan, dan orientasi hidupnya dalam situasi yang penuh dengan berbagai alternatif nilai dan pilihan sosial.

Juggernaut of Modernity dan Konsekuensi Eksistensialnya

Interaksi antara distansiasi ruang-waktu, mekanisme pelepasan, dan refleksivitas modernitas melahirkan apa yang disebut Giddens sebagai *juggernaut of modernity* (Elsy et al., 2024). Giddens menggunakan metafora *juggernaut* untuk menggambarkan modernitas sebagai sebuah mesin raksasa yang bergerak sangat cepat, memiliki daya dorong luar biasa, tetapi tidak pernah sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manusia (Ritzer & Yagatich, 2012). Meskipun manusia dapat mengarahkan dan mengelola sebagian jalannya modernitas melalui berbagai bentuk perencanaan sosial, modernitas tetap mengandung kemungkinan untuk bergerak ke arah yang tidak diinginkan.

Menurut Giddens, potensi lepas kendalinya *juggernaut* modernitas tidak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan manusia semata. Sebaliknya, kondisi tersebut muncul karena adanya kesalahan desain sistem (*design faults*), kegagalan para pelaku dalam mengoperasikan sistem (*operator failure*), konsekuensi yang tidak diharapkan dari tindakan manusia (*unintended consequences*), serta masuknya pengetahuan baru yang secara terus-menerus mengubah arah perkembangan sosial (Giddens, 1990). Karena itulah, modernitas selalu mengandung unsur ketidakpastian yang tidak dapat dieliminasi sepenuhnya.

Konsekuensi eksistensial dari kondisi tersebut adalah munculnya masyarakat risiko (*risk society*) (Giddens, 1984). Berbeda dengan masyarakat pra-modern yang lebih banyak berhadapan dengan risiko alamiah seperti wabah penyakit, kekeringan, atau bencana alam, masyarakat modern justru menghadapi *manufactured risks* yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri (Giddens, 1991). Risiko-risiko tersebut meliputi krisis lingkungan global, ancaman senjata pemusnah massal, ketidakstabilan ekonomi internasional, hingga meningkatnya kecemasan psikologis akibat melemahnya sumber-sumber makna tradisional dalam kehidupan manusia.

Untuk mempertegas posisi teoretisnya, Giddens menawarkan perspektif yang berbeda dari sejumlah sosiolog kontemporer lainnya. Jika Ulrich Beck menekankan distribusi risiko global sebagai ciri utama masyarakat modern (Beck et al., 1994), dan Zygmunt Bauman menyoroti cairnya identitas dalam kondisi *liquid modernity* (Bauman, 2013), maka Giddens lebih menekankan kapasitas refleksif manusia dalam menghadapi perubahan sosial. Berbeda pula

dengan Peter Berger yang melihat kebangkitan kembali agama sebagai respons terhadap sekularisasi (Reaves, 2012), Giddens menempatkan tradisi sebagai sesuatu yang terus dinegosiasikan secara reflektif dalam kondisi *high modernity*.

Analisis perbandingan tersebut menunjukkan keunikan posisi teoritis Giddens. Ia tidak memandang manusia sebagai korban pasif dari struktur sosial yang represif. Sebaliknya, ia melihat bahwa hilangnya kepastian tradisional justru membuka ruang bagi terbentuknya *reflexive project of the self*, yaitu kemampuan individu dan komunitas untuk secara sadar menata ulang identitas, nilai, dan orientasi hidup mereka guna memperoleh rasa aman ontologis yang baru.

Tradisi dalam Perspektif Giddens

Sebelum melangkah pada analisis kasus di Indonesia, penting untuk menguraikan bagaimana ontologi tradisi dikonseptualisasikan dalam kerangka pemikiran Anthony Giddens. Berbeda dengan pandangan yang memaknai tradisi sekadar sebagai kebiasaan lama yang diwariskan dari generasi ke generasi, Giddens melihat tradisi sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi mendasar dalam menjaga kesinambungan kehidupan kolektif (Gross & Simmons, 2002). Tradisi bukan hanya kumpulan praktik yang diulang secara mekanis, melainkan mekanisme sosial yang berperan dalam mengorganisasi memori kolektif, membentuk identitas bersama, serta menjamin kontinuitas hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan (Gross & Simmons, 2002).

Dalam perspektif ini, tradisi memiliki struktur internal yang memungkinkan keberlangsungannya dalam kehidupan sosial. Giddens mengidentifikasi empat elemen utama yang menjadi fondasi bagi eksistensi tradisi, yaitu *formulaic truth*, ritual, *guardians*, dan *ontological security*. Keempat unsur tersebut bekerja secara simultan untuk mempertahankan legitimasi tradisi sekaligus memastikan keberlanjutannya di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

1. Kebenaran Formulaik (*Formulaic Truth*)

Elemen pertama tradisi adalah *formulaic truth* atau kebenaran formulaik. Berbeda dengan pengetahuan ilmiah yang menuntut pembuktian empiris dan verifikasi rasional, kebenaran dalam tradisi memperoleh legitimasi dari keberlangsungannya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ditaati bukan karena telah melalui proses pengujian ilmiah, melainkan karena dianggap mengandung nilai-nilai sakral yang telah diterima dan dijaga oleh komunitas selama lintasan sejarah yang panjang (Gross & Simmons, 2002).

Dalam konteks ini, tata cara pelaksanaan ritual, urutan upacara adat, maupun norma-norma sosial yang diwariskan memperoleh otoritasnya dari kesinambungan historis yang dimilikinya. Kepatuhan terhadap tradisi dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap kebijaksanaan kolektif yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, kebenaran tradisional sering kali memiliki dimensi moral dan simbolik yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar pertimbangan rasional-instrumental.

2. Ritual

Elemen kedua yang menopang tradisi adalah ritual. Tradisi tidak dapat bertahan hanya sebagai gagasan abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam praktik-praktik sosial yang dapat dialami dan dihayati oleh anggota masyarakat. Melalui ritual, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang dapat diwariskan dan direproduksi secara terus-menerus (Gross & Simmons, 2002).

Ritual berfungsi sebagai penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui pelaksanaan ritual, memori kolektif dipelihara dan identitas sosial diperkuat. Selain itu, ritual juga memberikan ritme yang teratur bagi kehidupan masyarakat, sehingga individu dapat merasakan keterhubungan dengan komunitas serta warisan budaya yang melampaui keberadaan dirinya sendiri.

3. Penjaga (*Guardians*)

Keberlangsungan tradisi juga memerlukan keberadaan para penjaga atau *guardians* (Gross & Simmons, 2002). Para penjaga tradisi dapat berupa tetua adat, pemuka agama, pendeta, ulama, maupun figur-figur lain yang memiliki otoritas dalam menafsirkan dan mentransmisikan

nilai-nilai tradisional kepada generasi berikutnya. Mereka berfungsi sebagai mediator yang menjaga kesinambungan antara warisan masa lalu dan kebutuhan masyarakat masa kini.

Dalam hal ini, posisi para penjaga tradisi berbeda secara mendasar dengan para ahli atau *experts* dalam sistem modern. Otoritas para ahli modern biasanya bersumber dari sertifikasi formal, pendidikan profesional, dan legitimasi institusional. Sebaliknya, otoritas para penjaga tradisi lahir dari posisi karismatik, pengakuan sosial, atau kedudukan askriptif yang memungkinkan mereka menjadi penafsir utama atas teks-teks sakral, nilai budaya, dan memori kolektif komunitas (Hannan & Mursyidi, 2023). Karena itu, legitimasi mereka lebih banyak bertumpu pada kepercayaan sosial daripada kredensial teknis semata.

4. Rasa Aman Ontologis (*Ontological Security*)

Elemen keempat yang tidak kalah penting adalah *ontological security* atau rasa aman ontologis (Giddens, 1984). Menurut Giddens, salah satu fungsi utama tradisi adalah menyediakan kerangka makna yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan dengan perasaan aman dan stabil. Tradisi membantu individu memahami dunia di sekitarnya sekaligus memberikan pedoman mengenai bagaimana mereka harus bertindak dalam berbagai situasi kehidupan.

Dengan menyediakan pola tindakan yang telah teruji oleh waktu, tradisi mengurangi ketidakpastian yang melekat dalam pengalaman manusia. Individu tidak perlu terus-menerus mempertanyakan setiap aspek kehidupannya karena tradisi telah menyediakan seperangkat jawaban yang dianggap sah dan dapat dipercaya. Dalam pengertian ini, tradisi berfungsi sebagai sumber rasa aman ontologis, yaitu keyakinan mendasar bahwa dunia sosial memiliki keteraturan, stabilitas, dan makna yang dapat dipahami.

Detradisionalisasi dan Pergeseran Posisi Tradisi

Ketika *juggernaut* modernitas meluas ke seluruh penjuru dunia, terjadilah proses yang oleh Giddens disebut sebagai detradisionalisasi (Tucker, 1998). Namun, penting untuk dipahami bahwa detradisionalisasi tidak berarti hilangnya tradisi secara fisik atau lenyapnya seluruh praktik budaya tradisional dari kehidupan masyarakat. Sebaliknya, detradisionalisasi merujuk pada perubahan posisi epistemologis tradisi dalam masyarakat modern, khususnya ketika tradisi tidak lagi diterima secara otomatis tanpa pertanyaan (Gross & Simmons, 2002).

Dalam masyarakat tradisional, banyak praktik sosial dijalankan karena dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan yang tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut. Akan tetapi, di era modernitas tinggi, perkembangan sistem pakar, pendidikan modern, dan arus informasi global memperkenalkan berbagai alternatif cara hidup yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat lokal. Akibatnya, tradisi tidak lagi dapat dijalankan secara *taken for granted*, melainkan harus mampu memberikan alasan rasional mengenai relevansi dan manfaatnya dalam kehidupan kontemporer (Gross & Simmons, 2002).

Kondisi tersebut memaksa tradisi memasuki ruang publik untuk mempertahankan legitimasi sosialnya. Tradisi harus menunjukkan kemampuannya dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul akibat modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin kompleks. Dengan kata lain, keberlangsungan tradisi tidak lagi bergantung semata-mata pada pewarisan historis, tetapi juga pada kemampuannya untuk beradaptasi dan bernegosiasi dengan tuntutan zaman.

Tradisi sebagai Pilihan Refleksif

Dalam konteks modernitas tinggi, tradisi mengalami transformasi mendasar dari sesuatu yang diwarisi secara pasif menjadi sesuatu yang dipilih secara reflektif. Individu modern tetap dapat menjalankan ritual keagamaan, mematuhi adat istiadat, atau mempertahankan identitas budaya tertentu, tetapi keputusan tersebut tidak lagi lahir dari ketidaktahuan terhadap alternatif lain (Giddens, 1991). Sebaliknya, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses refleksi yang melibatkan pertimbangan, evaluasi, dan pilihan sadar terhadap berbagai kemungkinan yang tersedia.

Pilihan untuk mempertahankan tradisi menjadi bagian dari apa yang disebut Giddens sebagai *reflexive project of self-identity* (Giddens, 1991). Dalam proyek reflektif ini, individu secara aktif membangun identitas dirinya dengan memilih, menafsirkan ulang, dan bahkan

memodifikasi unsur-unsur tradisi yang dianggap relevan bagi kehidupannya. Tradisi tidak lagi hadir sebagai warisan yang diterima begitu saja, melainkan sebagai sumber daya kultural yang digunakan secara sadar untuk menghadapi ketidakpastian dunia modern.

Pandangan ini menunjukkan bahwa modernitas tidak selalu berujung pada hilangnya tradisi sebagaimana diasumsikan oleh sebagian teori modernisasi klasik. Yang terjadi justru adalah transformasi refleksif tradisi, yaitu proses ketika tradisi direinterpretasi, dinegosiasikan, dan direkonstruksi agar tetap memiliki makna dalam konteks sosial yang terus berubah. Dengan demikian, hubungan antara modernitas dan tradisi tidak bersifat antagonistik, melainkan dialektis, di mana keduanya saling berinteraksi dan membentuk konfigurasi sosial yang baru.

Dialektika dan Praktik Negosiasi Tradisi di Indonesia

Indonesia merupakan arena empiris yang sangat menarik untuk menguji relevansi teori modernitas Anthony Giddens. Sebagai negara yang dibangun di atas fondasi keberagaman adat, budaya, dan religiositas yang kuat, Indonesia memperlihatkan dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan asumsi modernisasi linear yang memprediksi hilangnya tradisi seiring perkembangan modernitas. Sebaliknya, berbagai pengalaman sosial di Indonesia menunjukkan bahwa *juggernaut* modernitas tidak selalu menghancurkan tradisi, melainkan sering kali dinegosiasikan, disesuaikan, dan dijinakkan melalui kapasitas refleksif masyarakat (Hannan & Mursyidi, 2023).

Dalam konteks tersebut, tradisi tidak hadir sebagai warisan pasif yang hanya dipertahankan atau ditinggalkan. Tradisi justru menjadi sumber daya kultural yang terus direkonstruksi untuk menjawab tantangan zaman. Proses negosiasi ini dapat diamati secara jelas dalam berbagai ranah kehidupan sosial, mulai dari transformasi praktik keagamaan, adaptasi struktur adat, hingga reinterpretasi ritual agraris di tengah arus modernisasi.

1. Digitalisasi Agama dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan

Masuknya teknologi komunikasi digital ke Indonesia berfungsi sebagai *disembedding mechanism* yang sangat kuat dalam mentransformasi kehidupan keagamaan masyarakat (Hannan & Mursyidi, 2023). Kehadiran internet dan media sosial telah mengubah cara umat beragama memperoleh pengetahuan, membangun komunitas, dan berinteraksi dengan otoritas keagamaan (Saat & Burhani, 2020). Akibatnya, batas-batas spasial dan temporal yang sebelumnya menjadi fondasi praktik keagamaan tradisional mengalami pergeseran yang sangat signifikan.

Secara historis, masjid, pesantren, surau, dan majelis taklim berfungsi sebagai pusat utama transmisi pengetahuan keagamaan. Ruang-ruang fisik tersebut menjadi tempat berlangsungnya proses pembelajaran yang mengandalkan interaksi langsung antara guru dan murid. Namun, perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk baru pengalaman keagamaan yang tidak lagi bergantung pada kedekatan geografis sehingga terjadi proses distansiasi ruang dan waktu secara radikal (Ritzer & Yagatich, 2012).

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya popularitas pengajian daring atau *online pengajian* yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja (Subchi et al., 2025). Umat Islam tidak lagi harus hadir secara fisik di masjid atau pesantren untuk memperoleh ceramah keagamaan. Sebaliknya, berbagai platform digital memungkinkan pengetahuan agama didistribusikan secara instan kepada jutaan pengguna dalam waktu yang bersamaan.

Transformasi tersebut turut memicu fragmentasi dan pluralisasi otoritas keagamaan di Indonesia (Hannan & Mursyidi, 2023). Jika pada masa sebelumnya otoritas keagamaan lebih banyak dimonopoli oleh organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah melalui jaringan ulama, kiai, serta institusi pendidikan keagamaannya, maka era digital membuka ruang bagi munculnya aktor-aktor baru dalam produksi pengetahuan agama (Saat & Burhani, 2020). Otoritas tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh posisi institusional, melainkan juga oleh kemampuan mengelola media dan membangun audiens digital.

Fenomena ini tampak pada kemunculan para dai populer yang sering diasosiasikan dengan kelompok *new santri*. Mereka tidak selalu berasal dari jalur pendidikan tradisional yang panjang ataupun memiliki penguasaan mendalam terhadap khazanah kitab klasik. Akan tetapi, mereka memiliki kemampuan tinggi dalam memanfaatkan estetika visual, algoritma media sosial,

dan bahasa populer yang mampu menjangkau kebutuhan emosional generasi muda perkotaan (Saat & Burhani, 2020).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan mengalami pergeseran dari basis tradisional menuju basis reflektif-digital. Dalam konteks ini, jumlah pengikut, kemampuan komunikasi publik, dan visibilitas media sering kali menjadi faktor penting dalam membangun pengaruh sosial. Dengan demikian, otoritas keagamaan mengalami transformasi dari model hierarkis menuju model yang lebih cair dan kompetitif.

Pergeseran ini melahirkan berbagai fenomena baru seperti gerakan hijrah digital dan berkembangnya komunitas keagamaan populer seperti Pemuda Hijrah (Saat & Burhani, 2020). Agama tidak lagi dipahami semata-mata sebagai seperangkat doktrin normatif yang diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, agama semakin tampil sebagai *lifestyle choice* yang dipilih secara sadar dan digunakan sebagai sarana pembentukan identitas diri di tengah kompleksitas kehidupan modern.

Meskipun demikian, digitalisasi tidak serta-merta menghasilkan sekularisasi sebagaimana diprediksi oleh sebagian teori modernisasi klasik. Media sosial justru menjadi arena baru bagi reproduksi dan revitalisasi tradisi keagamaan (Hannan & Mursyidi, 2023). Tradisi-tradisi keagamaan yang sebelumnya berlangsung dalam ruang fisik kini mengalami proses *re-embedding* ke dalam ruang digital yang lebih luas dan fleksibel.

Salah satu contoh yang menarik adalah penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi melalui siaran langsung *multi-platform livestreaming*. Tradisi yang sebelumnya bersifat lokal dan terbatas pada komunitas tertentu kini dapat diikuti oleh masyarakat lintas daerah bahkan lintas negara. Fenomena ini memperlihatkan bahwa teknologi digital tidak selalu menjadi ancaman bagi tradisi, melainkan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas jangkauan dan keberlanjutan praktik-praktik keagamaan.

Dalam perspektif Giddens, digitalisasi agama menunjukkan bekerjanya proses *disembedding* dan *re-embedding* secara simultan. Otoritas keagamaan dilepaskan dari ruang fisik tradisional, tetapi kemudian disematkan kembali ke dalam sistem komunikasi digital yang baru. Dengan demikian, yang berubah bukanlah keberadaan agama itu sendiri, melainkan bentuk, medium, dan mekanisme distribusi otoritas keagamaan dalam masyarakat modern.

2. Adaptasi Struktur Adat Minangkabau dalam Arus Globalisasi

Negosiasi tradisi yang tidak kalah menarik dapat diamati dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Kebudayaan Minangkabau dikenal sebagai salah satu sistem sosial yang unik karena berhasil memadukan sistem kekerabatan matrilineal dengan ajaran Islam yang dirumuskan dalam falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) (Ahmad Darwis & Muslim, 2024). Kombinasi ini menjadikan Minangkabau sebagai contoh penting mengenai bagaimana tradisi lokal dapat bertahan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Salah satu institusi penting dalam kebudayaan Minangkabau adalah tradisi merantau (Ahmad Darwis & Muslim, 2024). Tradisi ini mendorong generasi muda untuk meninggalkan kampung halaman guna memperoleh pengalaman, pendidikan, dan kemandirian ekonomi di berbagai wilayah. Dalam perspektif Giddens, merantau dapat dipahami sebagai bentuk *disembedding mechanism* tradisional yang telah lama ada sebelum modernitas global berkembang.

Tradisi merantau melepaskan individu dari keterikatan geografis terhadap nagari asalnya, tetapi pada saat yang sama tetap mempertahankan hubungan simbolik dengan identitas adat dan keluarga (Ahmad Darwis & Muslim, 2024). Melalui proses ini, masyarakat Minangkabau telah lama terbiasa berinteraksi dengan dunia luar tanpa harus kehilangan akar budayanya. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi arus globalisasi modern.

Namun demikian, modernitas tetap menghadirkan berbagai tantangan struktural bagi ketahanan adat Minangkabau. Penetrasi hukum nasional, ekspansi ekonomi pasar, serta meningkatnya kebutuhan investasi sering kali berbenturan dengan sistem kepemilikan komunal atas tanah ulayat yang menjadi salah satu fondasi utama kehidupan adat (Triani et al., 2024). Ketegangan tersebut menunjukkan adanya perjumpaan antara logika kolektivitas tradisional dan logika individualisme modern.

Selain itu, perubahan gaya hidup perkotaan turut memengaruhi struktur hubungan keluarga Minangkabau. Posisi mamak sebagai figur sentral dalam pengasuhan dan pendidikan kementerian tidak lagi berjalan dengan pola yang sama seperti pada masa lalu. Mobilitas sosial dan geografis yang semakin tinggi menyebabkan otoritas tradisional harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang baru (Syafitri & Kadarisman, 2025).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, masyarakat Minangkabau tidak merespons perubahan dengan sikap penolakan total. Sebaliknya, mereka melakukan berbagai bentuk adaptasi yang memungkinkan adat tetap bertahan dalam lingkungan sosial yang terus berubah. Prinsip fleksibilitas ini tercermin dalam pepatah adat yang menegaskan bahwa adat tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan (Nugroho, 2016).

Proses negosiasi refleksif terlihat dalam pengelolaan tanah ulayat yang semakin terintegrasi dengan sistem hukum nasional (Triani et al., 2024). Berbagai regulasi daerah dirumuskan untuk mengakomodasi keberadaan hak-hak adat dalam kerangka administrasi negara modern. Dengan cara ini, masyarakat Minangkabau berusaha mempertahankan substansi adat tanpa menolak sepenuhnya sistem hukum yang berlaku.

Di tingkat keluarga, peran mamak juga mengalami transformasi fungsional (Syafitri & Kadarisman, 2025). Jika sebelumnya mamak berperan sebagai otoritas yang relatif dominan, kini posisinya lebih berkembang sebagai fasilitator dan pendamping dalam menghadapi berbagai tantangan modern, seperti pendidikan tinggi, mobilitas kerja, dan karier profesional. Pergeseran ini menunjukkan bahwa adaptasi tidak selalu berarti hilangnya tradisi, tetapi dapat berupa perubahan fungsi agar tetap relevan.

Tradisi Makan Bajamba juga mengalami proses transformasi yang serupa. Praktik yang dahulu terutama berlangsung dalam konteks komunitas lokal kini dikemas sebagai festival budaya yang dipromosikan melalui media digital. Melalui strategi tersebut, tradisi tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperkenalkan kepada generasi muda sebagai simbol identitas kolektif yang tetap relevan di era globalisasi (Hardi, 2025).

Kasus Minangkabau menunjukkan bahwa tradisi tidak bertahan karena menolak modernitas, melainkan karena kemampuannya beradaptasi secara refleksif. Masyarakat Minangkabau memperlihatkan kapasitas tinggi dalam mengintegrasikan hukum negara, ekonomi global, dan institusi modern ke dalam struktur adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, tradisi tetap hidup karena mengalami rekonstruksi, bukan karena mempertahankan bentuk lamanya secara kaku.

3. Rasionalisasi Ritual Agraris Jawa di Tengah Modernisasi

Di Pulau Jawa, hubungan antara modernitas dan tradisi dapat diamati melalui transformasi ritual agraris seperti Wiwitan dan Slametan (Muqoyyidin, 2013). Kedua ritual tersebut telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pertanian Jawa sebagai sarana mengungkapkan rasa syukur, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga hubungan simbolik dengan alam (Salsabila, 2022). Dalam praktiknya, ritual tersebut memuat berbagai unsur simbolik yang mencerminkan pandangan kosmologis masyarakat agraris tradisional.

Masuknya modernisasi pertanian sejak era Revolusi Hijau membawa perubahan besar terhadap struktur kehidupan perdesaan (Salsabila, 2022). Penggunaan mesin pertanian, pupuk kimia, bibit unggul, serta sistem produksi yang semakin berorientasi pasar telah mengubah cara masyarakat memahami aktivitas pertanian (Pranajaya et al., 2020). Pertanian tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aktivitas spiritual dan ekologis, melainkan juga sebagai kegiatan ekonomi yang harus memenuhi tuntutan efisiensi dan produktivitas (Pranajaya et al., 2020).

Perubahan tersebut berpotensi menggeser posisi ritual tradisional dalam kehidupan masyarakat. Namun, alih-alih menghilang, ritual Wiwitan dan Slametan justru mengalami proses penyesuaian yang memungkinkan keduanya tetap bertahan (Salsabila, 2022). Para petani melakukan berbagai bentuk modifikasi agar ritual dapat berjalan selaras dengan kebutuhan praktis masyarakat modern.

Salah satu bentuk adaptasi terlihat pada aspek temporal pelaksanaan ritual (Salsabila, 2022). Penentuan waktu pelaksanaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perhitungan kalender tradisional, melainkan disesuaikan dengan jadwal panen, penggunaan mesin pertanian,

dan ketersediaan tenaga kerja. Perubahan ini menunjukkan adanya rasionalisasi tanpa menghilangkan makna simbolik ritual.

Adaptasi juga terjadi pada aspek material ritual (Salsabila, 2022). Berbagai komponen sesaji yang sulit diperoleh atau membutuhkan biaya besar mulai disederhanakan dan digantikan dengan bahan yang lebih mudah diakses. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak dipahami sebagai penghilangan nilai spiritual, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial-ekonomi yang berubah.

Dimensi yang paling penting adalah reinterpretasi teologis terhadap makna ritual (Muqoyyidin, 2013). Simbol-simbol kosmologis yang sebelumnya berkaitan dengan figur Dewi Sri direkonstruksi dalam kerangka teologi Islam. Akibatnya, Wiwitan dan Slametan tidak lagi dipahami sebagai bentuk pemujaan terhadap kekuatan supranatural tertentu, melainkan sebagai ekspresi syukur kepada Allah SWT atas hasil panen yang diperoleh (Muqoyyidin, 2013).

Dengan berbagai modifikasi tersebut, ritual agraris Jawa tetap bertahan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat (Salsabila, 2022). Ritual tidak lagi berfungsi sebagai sarana magis untuk mengendalikan alam, tetapi sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas komunitas, menjaga identitas budaya, dan memberikan rasa aman ontologis di tengah ketidakpastian ekonomi modern.

Kasus Wiwitan dan Slametan menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berujung pada penghapusan tradisi. Yang terjadi justru adalah proses reinterpretasi dan rekonstruksi makna agar tradisi tetap relevan dalam konteks sosial yang berubah. Dalam kerangka Giddens, fenomena ini memperlihatkan kapasitas refleksif masyarakat dalam menyesuaikan tradisi dengan tuntutan modernitas tanpa kehilangan fungsi sosial dan kulturalnya yang mendasar.

Menjinakkan Juggernaut: Refleksivitas sebagai Kerangka Kerja Adaptasi Budaya

Paparan analitis atas berbagai kasus negosiasi tradisi di Indonesia memberikan landasan kuat untuk merumuskan sebuah kontribusi teoretis baru yang melampaui batas-batas teori sosiologi Barat klasik. Kasus Indonesia membuktikan bahwa asumsi universal mengenai hilangnya tradisi akibat sapuan mesin modernitas (*juggernaut*) tidak sepenuhnya valid secara sosiologis (Elsy et al., 2024). Masyarakat Indonesia bukanlah korban pasif yang terlindas tanpa daya di bawah roda-roda modernitas tinggi (Thorpe & Jacobson, 2013). Sebaliknya, mereka tampil sebagai aktor berpengetahuan (*knowledgeable agents*) yang memiliki kemampuan refleksif luar biasa untuk mengevaluasi, mengadaptasi, dan merekonstruksi tradisi mereka guna "menjinakkan" daya rusak dari *juggernaut* tersebut.

Giddens sendiri dalam *The Consequences of Modernity* menyatakan bahwa kita harus "mengendarai juggernaut" karena tidak ada jalan keluar dari modernitas. Namun, dalam konteks Indonesia, proses mengendarai ini ditingkatkan esensinya menjadi tindakan "Menjinakkan Juggernaut" (*Taming the Juggernaut*). Menjinakkan di sini berarti melunakkan daya gilas mesin modernitas—yang bercorak individualistik, sekuler, dan rasional-instrumental—dengan cara menyuntikkan kembali nilai-nilai spiritualitas keagamaan dan solidaritas tradisional ke dalam instrumen-instrumen modernitas tersebut (Hannan & Mursyidi, 2023).

Untuk merumuskan hubungan dialektis ini secara konseptual, kita dapat memformulasikan sebuah model integrasi budaya refleksif. Hubungan antara daya gilas modernitas, kapasitas refleksif agensi, dan kontinuitas tradisi dapat disimulasikan melalui persamaan konseptual sosiologis berikut:

$$\mathcal{T}_j = \int \left(\mathcal{A}_r \cdot \frac{\mathcal{T}_d}{\mathcal{R}_m} \right) d\mathcal{C}_e$$

Di mana variabel-variabel di atas didefinisikan secara sosiologis sebagai berikut:

- $\mathcal{T}_j$ (*Tamed Juggernaut*): Indeks keberhasilan penjinakan modernitas oleh masyarakat, yang ditandai oleh terciptanya koeksistensi hibrida yang harmonis antara kemajuan

teknologi dan stabilitas identitas kultural.

- $\mathcal{A}_r$ (*Reflexive Agency*): Kapasitas agensi atau subjek sosial dalam melakukan evaluasi kritis, seleksi informasi, dan tindakan strategis terhadap perubahan zaman (Dayrobi et al., 2024).
- $\mathcal{T}_d$ (*Disembedded Tradition*): Tradisi yang telah dilepaskan dari keterikatan ruang-waktu fisik kuno dan siap untuk diformulasikan ulang ke dalam sistem abstrak modern (Giddens, 1990).
- $\mathcal{R}_m$ (*Manufactured Risk*): Risiko buatan yang ditimbulkan oleh modernitas radikal (seperti alienasi sosial, sekularisme ekstrem, ketidakpastian ekonomi global) yang mengancam rasa aman ontologis (Giddens, 1984).
- $\mathcal{C}_e$ (*Cultural Capacity of Re-embedding*): Kapasitas integratif dari kebudayaan lokal untuk menyematkan kembali (*re-embed*) nilai-nilai tradisional ke dalam wadah institusi modern tanpa kehilangan esensi terdalamnya (Giddens, 1991).

Penjelasan teoretis dari model ini menunjukkan bahwa keberhasilan "Menjinakkan Juggernaut" ($\mathcal{T}_j$) berbanding lurus dengan kekuatan agensi refleksif ($\mathcal{A}_r$) dalam mengolah tradisi yang telah terdisosiasi ($\mathcal{T}_d$) serta kapasitas integratif kebudayaan lokal ($\mathcal{C}_e$) dalam menyematkan kembali nilai-nilai tersebut. Sebaliknya, penjinakan ini akan melemah jika risiko manufaktur ($\mathcal{R}_m$)—seperti komodifikasi budaya yang ekstrem atau sekularisasi radikal—tidak dapat dimitigasi secara efektif oleh pertahanan eksistensial masyarakat (Giddens, 1991).

Melalui mekanisme refleksivitas ini, modernitas tinggi dan tradisi di Indonesia tidak lagi saling menghancurkan. Keduanya berinteraksi dalam sebuah proses dialektika hibridisasi, di mana instrumen modernitas (seperti media sosial, hukum rasional-legal, dan efisiensi agribisnis) diadopsi sepenuhnya untuk mempermudah kehidupan materiil (Hannan & Mursyidi, 2023), namun di saat yang sama, kehangatan relasional dan kedalaman spiritual dari tradisi disuntikkan kembali ke dalam sistem modern tersebut untuk mencegah terjadinya kehampaan eksistensial dan keterasingan sosial (Giddens, 1990). Strategi penjinakan ini memastikan terciptanya koeksistensi hibrida yang tangguh, di mana kemajuan peradaban modern berjalan beriringan dengan kelestarian warisan leluhur.

SIMPULAN

Analisis kritis berbasis perspektif Giddensian terhadap dinamika sosial-budaya di Indonesia membuktikan secara meyakinkan bahwa tradisi tidak ditakdirkan untuk runtuh atau punah di hadapan arus modernitas tinggi. Melalui serangkaian negosiasi aktif—yang termaterialisasi dalam digitalisasi interaksi keagamaan, kelenturan hukum waris dan kepemimpinan adat Minangkabau, serta penataan ulang ritual tani Jawa—masyarakat Indonesia memperlihatkan bahwa tradisi mengalami transformasi, reinterpretasi, dan revitalisasi yang berkelanjutan. Konsep refleksivitas institusional Giddens secara akurat menjelaskan bagaimana aktor-aktor sosial di Indonesia menggunakan rasionalitas dan instrumen modernitas untuk memelihara relevansi tradisi, sehingga mereka tidak terlindas oleh *juggernaut* modernitas kontemporer.

Kontribusi teoretis utama dari artikel ini terletak pada formulasi konsep "Menjinakkan Juggernaut" (*Taming the Juggernaut*) sebagai model alternatif perkembangan modernitas di Global South. Konsep ini membantah bias universalitas sosiologi Barat yang menyamakan modernisasi dengan sekularisasi mutlak dan kematian tradisi. Indonesia menunjukkan bentuk koeksistensi yang sukses antara kemajuan teknologi-ekonomi modern dengan kekokohan spiritualitas tradisional. Tradisi di Indonesia tidak dipahami sebagai residu masa lalu yang statis, melainkan sebagai institusi dinamis yang terus dinegosiasikan, direkonstruksi, dan dijadikan sumber utama pertahanan rasa aman ontologis manusia modern.

Implikasi teoretis lanjutan dari kajian ini membuka jalan bagi agenda penelitian sosiologis di masa depan. Para peneliti berikutnya perlu melakukan studi komparatif empiris yang lebih mendalam mengenai batas-batas daya tahan agensi lokal dalam menghadapi bentuk-bentuk modernitas yang lebih ekstrem, seperti pengawasan kapitalisme algoritma raksasa (*surveillance capitalism*) dan ekspansi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) di ruang privat keagamaan. Selain itu, kajian mendalam terhadap kelompok-kelompok adat tertutup yang menerapkan strategi "penolakan parsial" terhadap modernitas (seperti komunitas adat Kajang atau Baduy) akan menjadi kontribusi teoretis yang sangat berharga untuk memperkaya variasi model penjinakan *juggernaut* modernitas dalam sosiologi global.

REFERENSI

- Ahmad Darwis, D., & Muslim, N. (2024). Minangkabau Cultural Identity: History And Development. *International Journal of Religion*, 5, 794–805. <https://doi.org/10.61707/fbvrnv21>
- Bauman, Z. (2013). *Liquid modernity*. John Wiley & Sons.
- Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1994). *Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order*. Stanford University Press.
- Dayrobi, M., Usqo, H., & Lubis, F. (2024). The Relationship Between Structuration Theory and Agency According to Giddens and Walters. *PKM-P*, 8, 348–353. <https://doi.org/10.32832/jurma.v8i2.2524>
- Elsy, P., Wirawan, I., & Saptandari, P. (2024). Kodokushi as the Impact of Juggernaut of Modernity in Japanese Hyper-Aging Era. *MOZAIK HUMANIORA*, 24, 28–43. <https://doi.org/10.20473/mozai.v24i1.47981>
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity* (F. Published (ed.)). Polity Press.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford University Press.
- Gross, N., & Simmons, S. (2002). Intimacy as a double-edged phenomenon? An empirical test of Giddens. *Social Forces*, 81(2), 531–555.
- Hannan, A., & Mursyidi, A. F. (2023). Social Media and the Fragmentation of Religious Authority among Muslims in Contemporary Indonesia. *Digital Muslim Review*, 1(2), 84–104. <https://doi.org/10.32678/dmr.v1i2.10>
- Hardi, T. T. (2025). Pelestarian Tradisi Makan Bajamba sebagai Warisan Budaya Tak Benda di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 14(2), 737–744.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Dialektika Islam dan budaya lokal Jawa. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 11(1), 1–18.
- Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia. *Solo: Pustaka Iltizam*, 11.
- Pranajaya, I. K., Suda, I. K., & Subrata, I. W. (2020). Marginalization of Bali traditional architecture principles. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 6(5), 10–20.
- Reaves, D. (2012). Peter Berger and the Rise and Fall of the Theory of Secularization. *Denison Journal of Religion*, 11(1), 1–15. <https://digitalcommons.denison.edu/religion/vol11/iss1/3/>
- Ritzer, G., & Yagatich, W. (2012). Contemporary Sociological Theory. *The Wiley-Blackwell Companion to Sociology*, 98–118. <https://doi.org/10.1002/9781444347388.ch6>
- Saat, N., & Burhani, A. N. (2020). *The New Santri: Challenges to traditional religious authority in Indonesia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Salsabila, H. (2022). Perubahan Tradisi Wiwitan di Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang (1980-2021). *Historiografi: Journal of Indonesian History and Education*. Sociology Institute. (2025). *The Dynamics of Secularization: Insights from Peter Berger*. <https://sociology.institute/sociology-of-religion/secularization-dynamics-peter-berger-insights/>
- Subchi, I., Ning Sulistiyowati, S. K. M., Hidayah, N., S E, P. D., Wicaksono, A., Kultsum, U., Latifa, R.,

- Toresano, W. O. Z. Z., Ud, M., & Nurul Adhha, S. S. I. (2025). *Pandemi di Berbagai Perspektif*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafitri, E. O., & Kadarisman, Y. (2025). PERGESERAN PERAN MAMAK PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DALAM ERA MODERNISASI DI NAGARI SUMPUR SUMATERA BARAT. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(7), 2896–2901.
- Thorpe, C., & Jacobson, B. (2013). Life politics, nature and the state: Giddens' sociological theory and The Politics of Climate Change. *The British Journal of Sociology*, 64, 99–122. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12008>
- Triani, L. D., Saragih, D. P., Saverio, M. A., Airlangga, A. R., Fazya, N. A., Husna, A., & Pratama, A. W. S. (2024). Pengaruh modernisasi terhadap pemeliharaan tanah ulayat di Minangkabau. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 146–157.
- Tucker, K. H. (1998). *Anthony Giddens and Modern Social Theory*. SAGE Publications.
- Turley, S. (2014). Immigration and the Church: A Christian response to the current border crisis. *Imaginative Conservative*.